

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapat dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sidenreng Rappang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sidenreng Rappang. Laporan Kinerja (LKj) menjadi dokumen pelaporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mencakup kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, Laporan Kinerja (LKj) tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja (Lkj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sidenreng Rappang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran startegis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sidenreng Rappang. Identifikasi keberhasilan, permasalahan

dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja (LKj), menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dalam pendekatan ini, Laporan Kinerja (LKj) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

### **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan' Dinas Perpustakaan dan kearsipan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
2. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### D. ISU STRATEGIS

Pada tingkatan dinamika nasional, maka yang menjadi isu strategis adalah peningkatan minat dan budaya baca. Demikian halnya pada tingkat dinamika regional/lokal maka peningkatan minat dan budaya baca menjadi isu yang prioritas untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kesamaan isu strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel I.1. Identifikasi Isu Strategis**

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Tidak ada isu yang relevan	Peningkatan Minat dan Budaya Baca	Peningkatan Minat dan Budaya Baca	-
2.	-	-	Pengelolaan Arsip secara baku	-
3.	-	-	-	-

Berdasarkan strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, maka beberapa isu strategis ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel I.2. Prioritas Isu Strategis**

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria			Total Skor
		1	2	N	
1.	Rendahnya minat dan budaya baca pelajar dan masyarakat pada umumnya	50 8x50=400	60 9x60=540	55 10x55=550	1.490
2.	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pengelolaan kearsipan ditingkat deslur dan SKPD akan pentingnya	40 8x40=320	30 6x30=180	35 6x35=210	710

	kearsipan				
3.	Kualitas SDM Pengelola Kearsipan dan perpustakaan masih minim	75 $8 \times 75 = 600$	65 $6 \times 65 = 390$	70 $9 \times 70 = 630$	1.620
4.	Kurangnya Sarana & Prasarana Aparatur	70 $8 \times 70 = 560$	60 $6 \times 60 = 360$	70 $7 \times 70 = 490$	1.410

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa, kurangnya kesadaran dan pemahaman lingkup desa, kelurahan dan SKPD akan pentingnya kearsipan dengan jumlah skor 710 merupakan isu prioritas utama yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan mendesak untuk diselesaikan berdasarkan target capaian kinerja yang telah ditetapkan, disamping isu prioritas lainnya yang menjadi target capaian kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

## E. STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Susunan Organisasi Dinas perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Deposit, Pelestarian, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka:
  - a. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka,
  - b. Seksi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka.
4. Bidang Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan:
  - a. Seksi Layanan dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Perpustakaan
  - b. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

5. Bidang Pengelolaan, Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan:
  - a. Seksi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip,
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.

## F. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung oleh 26 PNS dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Komposisi SDM menurut Gender

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan komposisi SDM antara Laki-laki dan Perempuan jumlahnya seimbang, laki-laki 13 orang dan perempuan 13 orang.

**Tabel I.3. Komposisi SDM berdasarkan Gender**

UNIT KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Kepala Dinas	1	-	1
Sekretariat	4	3	7
Bidang Deposit	4	1	5
Bidang Layanan	3	3	6
Bidang Arsip	-	6	6
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>25</b>

### 2. Komposisi SDM menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi SDM menurut jenjang pendidikan di Dinas Perpustakaan dan dan Kearsipan terdiri dari Pasca Sarjana, Sarjana, Sarjana Muda dan SMA.

**Tabel I.4. Komposisi SDM Menurut Jenjang Pendidikan**

UNIT KERJA	PASCA SARJANA	SARJANA	SARJAN A MUDA	SMA/ SMP	TOTAL
Kepala Dinas	-	1	-	-	1
Sekretariat	1	4	-	2	7
Bidang Deposit	1	4	-	-	5
Bidang Layanan	3	-	1	2	6
Bidang Arsip	-	3	1	2	6
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>25</b>

### 3. Komposisi SDM menurut Golongan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan komposisi SDM menurut golongan terdapat tiga golongan yaitu golongan II, III dan IV.

**Tabel I.5. Komposisi SDM menurut Golongan**

UNIT KERJA	GOL. IV	GOL. III	GOL. II	TOTAL
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretariat	2	3	2	7
Bidang Deposit	1	4	-	5
Bidang Layanan	1	3	2	6
Bidang Arsip	1	4	1	6
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>25</b>

### 4. Komposisi SDM menurut Jenjang Eselon

Komposisi SDM menurut jenjang Eselon berjumlah 13 orang terdiri dari Eselon II, III dan IV.

**Tabel I.6. Komposisi SDM menurut jenjang Eselon**

UNIT KERJA	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	TOTAL
Kepala Dinas	1	-	-	1
Sekretariat	-	1	2	3
Bidang Deposit	-	1	2	3
Bidang Layanan	-	1	2	3
Bidang Arsip	-	1	2	3
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk lima (5) tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan Politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan Visi dan Misi SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tertuan dalam RENSTRA tersebut.

#### **1. VISI :**

***“ Mewujudkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Sumber Pelayanan dan Informasi Menuju Sidenreng Rappang Cerdas dan Budaya Tertib Arsip”***

Maksud dari Visi tersebut adalah menjadikan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai lembaga yang mampu menyajikan informasi arsip dan bahan pustaka kepada pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara dan penerapan budaya tertib arsip.

## 2. MISI :

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka disusun Misi yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan.
- b. Meningkatkan Promosi Gemar Membaca dan Budaya Tertib Arsip.
- c. Meningkatkan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Kearsipan.
- d. Membangun Perpustakaan dan Arsip berbasis IT.
- e. Membangun Jaringan Sistem Informasi Kearsipan.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dalam rancangan RENSTRA ini diartikan sebagai suatu yang ingin dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok Visi, sementara sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

<b>Visi : Mewujudkan Kantor Arsip dan Perpustakaan Sebagai Sumber Pelayanan dan Informasi Menuju Sidenreng Rappang Cerdas dan Budaya Tertib Arsip</b>			
<b>1: Meningkatkan Kualitas Layanan Kearsipan dan Perpustakaan</b>			
<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
- Meningkatkan Kualitas SDM	- Meningkatnya Kualitas SDM	- Mengembangkan Program dan	- Pengembangan Pengetahuan

Pengelolah Kearsipan dan Perpustakaan - Meningkatkan Volume dan Mutu Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengelolah Kearsipan dan Perpustakaan - Meningkatnya Volume dan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Bimtek Perpustakaan dan Kearsipan - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	dan Ketrampilan bagi Arsiparis, dan Pustakawan - Penguatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
---	--	---	---

**Misi 2 : Mengembangkan Budaya Gemar Membaca dan Budaya Tertib Arsip**

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
- Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat - Meningkatkan Budaya Tertib Arsip Lingkup Pemkab Sidrap	- Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat - Meningkatnya Budaya Tertib Arsip Lingkup Pemkab Sidrap	- Pengembangan Budaya Baca - Pengembangan Budaya Tertib Arsip di Lingkungan Pemkab Sidrap	- Memasyarakatkan Minat dan Budaya Baca dalam Keluarga - Memasyarakatkan Budaya Tertib Arsip di Lingkungan Pemkab Sidrap

**Misi 3 : Membangun Perpustakaan dan Arsip Berbasis Informasi dan Teknologi**

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
- Mewujudkan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan dengan Sistem Teknologi Informasi	- Meningkatnya Jangkauan Pelayanan Perpustakaan Keliling - Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Kearsipan yang Baku	- Pengembangan Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan dengan Sistem Teknologi Informasi	- Memasyarakatkan Sistem Teknologi Informasi Kearsipan dan Perpustakaan -

**Misi 4 : Membangun Jaringan Sistem Informasi Kearsipan**

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatkan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Sistem Administrasi Kearsipan	Pengembangan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Memasyarakatkan Sistem Informasi Kearsipan

#### 4. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

**Tabel II.2. Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Volume, mutu dan kualitas sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya efektifitas dan efisiensi Laporan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Meningkatnya persentase Volume arsip dan dokumen Daerah yang didata, ditata, diolah dan disimpan	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 dilakukan mengacu pada RENSTRA, RENJA 2018, IKU DAN APBD 2018. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan PK sebagai berikut

**Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Berkesinambungan</b>	<b>Peningkatan Kualitas dan Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</b>	
		Tersedianya Materai	150 Lbr
		Terbayarnya Tagihan Listrik dan Telepon	12 Bulan
		Tersedianya Asuransi Kendaraan Dinas	2 Unit
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas	10 Unit
		Tersedianya Honor PNS dan Non PNS	12 Bulan
		Tersedianya Alat Pembersih dan Honor Cleaning Service	12 Bulan
		Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	18 Kali
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	12 Kali
		Tersedianya Kebutuhan dan Jasa Administrasi Perkantoran	12 Bulan
2.	<b>Meningkatnya Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Berkesinambungan</b>	<b>Terciptanya Sistem Kinerja Aparatur Pemerintah yang Efektif dan Efisien</b>	
		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit
		Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	10 unit
		Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	9 unit
		Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	6 unit
3.	<b>Terciptanya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas, Efektif</b>	<b>Peningkatan Mutu Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	4 Laporan

	<b>dan Efesien, Transparan dan Akuntabel</b>		
4.		<b>Penyelamatan dan Pelestarian Doumen/ Arsip Daerah</b>	
		Persentase Volume Arsip dan Dokumen Daerah yang di Data, ditata, diolah dan disimpan	200 Box
5.		<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	
		Terbitnya Naskah Sumber Arsip	2 Dokumen
6.	<b>Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Minat Baca Masyarakat</b>	<b>Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Kepustakaan</b>	
		Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	106 Deslur
		Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan	500 Exp
		Meningkatnya budaya baca dan terbinanya perpustakaan Terpeliharanya Bahan Pustaka	11 Bulan 4 Triw

### C. PERJANJIAN KINERJA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Berikut:

**Tabel II.4. Indikator Kinerja Utama Dinas  
Perpustakaan dan Kearsipan**

Instansi	: DINAS PERPUSTKAAN DAN KEARSIPAN
Tugas	: Membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan.
Fungsi	: 1. Perumusan Kebijakan Tekhnis di bidang pengelolaan Arsip dan Perpustakaan; 2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; 3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; 4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dan 5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku/Jumlah SKPD x 100%	Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Kearsipan	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	orang	Menunjukkan jumlah SDM yang telag mengikuti kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Meningkatnya Kemampuan Literasi dan Minat Baca Masyarakat	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan/ Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Data BPS
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	Jumlah Perpustakaan	Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Data Dinas Pendidikan dan Budaya

#### **D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk di belanjakan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.649.386.000,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.5 Rencana Belanja Dinas Perpustakaan  
Dan Kearsipan**

No.	URAIAN	RENCANA (Rp.)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.804.061.000,-	100
2	Belanja Langsung	845.325.000,-	100
	<b>Jumlah</b>	<b>2.649.386.000,-</b>	<b>100</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang alokasinya untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6. Program dan Anggaran Tahun 2018**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	459.746.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.494.000,-
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.780.000,-
4.	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	8.800.000,-
5.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	19.968.000,-
6.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	240.204.500,-
	<b>TOTAL</b>	<b>845.325.000,-</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandate dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran Kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui Pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Pada Tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	20	17	85
	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	org	-	-	-
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	4.000	2.962	74
	Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	78	40	51

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung Sasaran Strategis dalam Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 4 (empat) indikator dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Sangat Memuaskan (capaian 100 persen) sebanyak 1 indikator
- Dua Indikator belum mencapai 100 persen
- Satu Indikator tidak terlaksana karena persoalan klasik (Keuangan)

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama di atas, kinerja dicapai menunjukkan bahwa 1 (satu) Indikator telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria Sangat Memuaskan dan 2 (dua) Indikator belum memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018 akan diuraikan pada Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis di bawah ini.

### **3.1. Capaian Kinerja**

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditergetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan</b>
----------	---

Analisis Pencapaian **Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	Persen	20	17	85
Rata-Rata Capaian						85

Target Kinerja diharapkan pada point a tidak tercapai dan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target persentase yang diharapkan karena berbagai permasalahan khususnya SDM Pengelola Arsip.

**b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	9	9	9	11	20

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan belum tercapai target dengan persentase Tahun 2014 s.d. 2018 sebesar 20%.

**c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	65	12	12

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah (Renstra) dan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku realisasi sampai tahun 2018 yaitu 12%. Artinya masih jauh dari target jangka menengah (renstra).

**d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Sumber Daya Manusia Pengelola Arsip yang masih kurang, 2). Regulasi-regulasi yang masih kurang.

Tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
3. Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
4. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kearsipan sebesar Rp. 45.643.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 28.768.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 27.606.000 atau 95,96 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Secara Baku sebanyak 2 (dua) Program dan 2 (dua) Kegiatan yaitu :

- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
- Kegiatan Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- Kegiatan Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip.

<b>2</b>	<b>Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat</b>
----------	--

Analisis Pencapaian **Sasaran 2 : Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	4.000	2.962	74
Rata-Rata Capaian						74

Target Kinerja diharapkan pada point a tercapai dengan dan dapat terlaksana sesuai dengan target persentase yang diharapkan. Hal disebabkan oleh beberapa Faktor di antaranya kurang SDM Pengelola Perpustakaan, Sarana/Prasarana Perpustakaan masih sangat kurang dan lokasi Perpustakaan dan yang tidak strategis.

**b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	1980	2211	2532	2772	2962

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran meningkatnya minat dan

budaya baca masyarakat belum tercapai target (bila dikaitkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani) dengan persentase Tahun 2014 s.d. 2018 sebesar 15%.

**c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	60	15	15

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah dan indikator Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun realisasi sampai tahun 2018 yaitu 15%.

**d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1). Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan yang masih kurang, Lokasi Perpustakaan yang tidak strategis.

Tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Peningkatan Minat dan Budaya Baca sebesar Rp. 22.466.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 10.466.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 10.466.000 atau 100,00 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Cuma 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan yaitu :

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Kegiatan Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan</b>
----------	--

Analisis Pencapaian **Sasaran 3 : Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan	1 Jumlah Perpustakaan yang dibina	Unit	78	40	51
Rata-Rata Capaian					51

Target Kinerja diharapkan pada point a tercapai dan dapat terlaksana sesuai dengan target persentase yang diharapkan..

**b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Perpustakaan yang dibina	40	80	120	160	200

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan belum tercapai target (bila dikaitkan dengan jumlah perpustakaan yang seharusnya dibina dalam jangka waktu 5 tahun) dengan persentase Tahun 2014 s.d. 2018 sebesar 200 unit perpustakaan dari target Renstra sebanyak 390 unit perpustakaan.

**c. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-rata Realisasi sampai dengan Tahun ini	Capaian (%)
1 Jumlah Perpustakaan Perpustakaan yang dibina	unit	390	200	51

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi Indikator Kinerja sampai dengan Tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah (renstra) dan indikator Jumlah Perpustakaan yang Dibina realisasi sampai tahun 2018 yaitu 51%.

**d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatkan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan disebabkan oleh beberapa hal

diantaranya: 1). Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan yang masih kurang, 2). Regulasi-regulasi yang masih kurang.

Tahun 2018 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebesar Rp. 3.260.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 7.060.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 3.234.000 atau 99,00 persen.

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/Kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan indikator kinerja Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Cuma 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan yaitu :

- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

**C. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018, di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 2.649.386.000, Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.804.061.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 845.325.000,- anggaran tersebut bersumber dari 100 % APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.602.910.485,- atau 98,25 % dari total pagu anggaran 2.649.386.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 46.475.515,- atau 1,75 % (*lihat : Lampiran 2*) Mengenai kinerja dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran. Hasil evaluasi terhadap kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang diukur menurut pencapaian 3 (tiga) Sasaran Strategis melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Komposisi realisasi anggaran pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.762.967.057,-
2. Belanja Langsung Rp. 839.943.448,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (Per Program) sebagai berikut :

**Tabel III.6 Realisasi Anggaran**

NO	SASARAN	CAPAIAN KEUANGAN PER PROGRAM			
		PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	459.746.000	456.610.048	99,32
2	Meningkatnya Mutu, Volume dan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.494.000	97.436.900	98,93
3	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Laporan	Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan	18.112.500	18.112.500	100,00

	Kinerja dan Keuangan	Capain Kinerja dan Keuangan			
4	Meningkanya Jumlah SKPD yang menerapkan Arsip secara Baku	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	8.800.000	7.940.000	90,23
5	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	240.204.500	240.178.000	99,99
<b>TOTAL</b>			<b>845.325.000</b>	<b>839.943.448</b>	<b>99,36</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Laporan Kinerja (LKJ) menjadi dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja (LKJ) akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja (LKJ) bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2018 adalah sangat baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi

anggaranannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke depan, terutama Sumber Daya Manusia Bidang Arsip dan Perpustakaan, Sarana Perpustakaan dan Depo Arsip. Bagi Instansi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj), hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa Permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk penerapannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kepala Dinas,

**ANDI LUBIS, S. Sos**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19591125 198502 1 002

